



Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Program Alokasi Dana Desa di Kecamatan Mattiro Bulu

Herman H¹, Didin Halim², Reza Mahyuddin³, Muh. Arifai⁴

Universitas Negeri Makassar^{1,2,3}

STIE Wirabhakti Makassar⁴

Email: hermandody@unm.ac.id

Abstrak. Partisipasi masyarakat dalam program alokasi dana desa di kecamatan mattiro bulu. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa. Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, dengan analisisnya tahapan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan alokasi dana desa. Penentuan lokasi penelitian memfokuskan ruang lingkup pembahasan dan sekaligus mempertajam fenomena sosial yang ingin dikaji sesuai dengan substansi kebijakan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan hasil pembangunan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat. Teknik pengambilan sampel dengan cara purposive sampling yaitu memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan dan dapat dipercaya untuk dijadikan sumber data yang valid, Informan tersebut dipilih secara sengaja. Jumlah sampel dalam penelitian ini dipilih sebanyak 42 orang dari perwakilan masing-masing Desa yang terdiri dari Masyarakat, tokoh masyarakat setempat yang dianggap penting dalam memberikan keterangan. Hasil penelitian partisipasi masyarakat yaitu 1. Tahap perencanaan meliputi gagasan awal melibatkan masyarakat (61.9%), usulan peserta musrembang diterima (85.7%), masyarakat menanggapi setiap program (78.6%), program melakukan kritik terhadap program (42.9%), masyarakat mendengarkan usulan pemerintah (81%) 2. Tahap pelaksanaan meliputi pembangunan sarana dan prasarana melibatkan masyarakat (73.8%), pemerintah melibatkan masyarakat (61.9%), pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam pembinaan dan pemberdayaan (52.4%), pemerintah desa melaksanakan program pembangunan dengan efektif (52.4%), masyarakat bersemangat memberikan usulan tenaga atau materi dalam pelaksanaan program (45.2%) 3. Tahap pemanfaatan meliputi program pemberdayaan bermanfaat (50%), pemerintah memberikan pelayanan prima (45%), program alokasi dana desa meningkatkan perekonomian (50%), program pembangunan sarana dan prasarana bermanfaat (50%), program pembangunan Desa efisien (66.7%) 4. Tahap hasil pembangunan meliputi pembangunan desa memberikan hasil yang memuaskan (64.3%), Program pembangunan desa memberikan hasil yang bermanfaat (52.4%), program pembangunan Desa berhasil meningkatkan kreativitas atau inovasi masyarakat (70%), program pembangunan desa sesuai harapan masyarakat (61.9%), program pembangunan Desa melalui program alokasi dana desa memuaskan masyarakat (83.3%). Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam program alokasi dana desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan hasil pembangunan memperoleh hasil yang baik.

Kata Kunci: Partisipasi, Alokasi Dana Desa

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan pemerintah merupakan suatu bentuk komitmen terhadap masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan pemerataan pembangunan. Kebijakan publik itu bukanlah sebuah proses yang lurus dalam artian mudah atau tidak kompleks yang terkadang lebih besar masalah yang ditimbulkan oleh proses pembuatan kebijakan publik daripada masalah yang dihadapi oleh masyarakat, karena di dalam kebijakan publik akan sangat dipengaruhi kepada siapa yang membuat dan akan memperoleh apa, kapan ketepatan pelaksanaan dan pembuatannya, serta bagaimana pembuatan kebijakan itu sendiri. Dalam administrasi publik terdapat program-program publik dilaksanakan melalui organisasi yang hirarkis dengan kontrol yang ketat oleh pimpinan organisasi.

Salah satu alasan rasional mengapa perlu ada Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Kebijakan ADD sejalan dengan agenda Otonomi daerah, dimana desa ditempatkan sebagai basis desentralisasi. Kebijakan ADD sangat relevan dengan perspektif yang menempatkan desa sebagai basis partisipasi. Karena desa berhadapan langsung dengan masyarakat dan control masyarakat lebih kuat. Sebagian besar Masyarakat Indonesia hidup di dalam komunitas pedesaan. Sehingga desentralisasi di tingkat desa akan meningkatkan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Salah satu bentuk program pemerintah dalam mempercepat pembangunan khususnya di pedesaan adalah program alokasi dana desa, bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat.

Melalui konsep partisipasi dimaksud menggambarkan tahapan partisipasi dalam proses pembangunan, yang mencakup Partisipasi pada tahap perencanaan, Partisipasi pada tahap pelaksanaan, Partisipasi pada tahap pemanfaatan dan Partisipasi pada tahap penilaian hasil pembangunan.

B. Tinjauan Pustaka

1. Kebijakan Publik

Harrold Laswell dan Abraham Kaplan berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktika-praktika sosial yang ada dalam masyarakat (Dikutif Dye, 1981). Ini berarti kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Ketika kebijakan publik berisi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan mendapat resistensi ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan publik harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktika-praktika yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

2. Kebijakan Alokasi Dana Desa

Prinsip pengelolaan ADD yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif. Artinya ADD harus dikelola dengan mengedepankan keterbukaan, dilaksanakan secara bertanggung jawab, dan juga harus melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat setempat. ADD merupakan bagian yang integral (satu kesatuan/tidak terpisahkan) dari APBDes mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban, dan pelaporannya. Penggunaan ADD ditetapkan sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional desa dan sebesar 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat. Diperlukan pelaporan atas setiap kegiatan yang dibiayai dari anggaran ADD secara berkala (bulanan) dan laporan hasil akhir penggunaan ADD. Laporan ini terpisah dari pertanggungjawaban APBDes, hal ini sebagai bentuk pengendalian dan monitoring serta bahan evaluasi bagi Pemda.

3. Partisipasi

Partisipasi sesungguhnya merupakan sikap keterbukaan terhadap persepsi dan prasana pihak lain, juga merupakan suatu perhatian mendalam mengenai perubahan yang akan dihasilkan oleh suatu kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan masyarakat. partisipasi juga merupakan kesadaran mengenai kontribusi yang diberikan oleh pihak lain untuk suatu kegiatan. Partisipasi juga merupakan masukan dalam proses pembangunan dan sekaligus menjadi keluaran atau sasaran dari pelaksanaan pembangunan. Partisipasi dalam konteks pembangunan desa mencakup keikutsertaan atau keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan, dan dalam penerapan program yaitu adanya pembagian keuntungan atau manfaat dari hasil pelaksanaan kegiatan serta keterlibatan warga dalam mengevaluasi kegiatan tersebut.

Konsep partisipasi dimaksud menggambarkan tahapan partisipasi dalam proses pembangunan, yang mencakup :

1. Partisipasi pada tahap perencanaan,
2. Partisipasi pada tahap pelaksanaan,
3. Partisipasi pada tahap pemanfaatan dan
4. Partisipasi pada tahap penilaian hasil pembangunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan adalah Penelitian Kuantitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program alokasi dana desa di Kec. Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini mengambil lokasi di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang, dengan unit analisisnya adalah Analisis tahapan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan alokasi dana desa di Kecamatan Mattiro Bulu. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk memfokuskan ruang lingkup pembahasan dan sekaligus mempertajam fenomena sosial yang ingin dikaji sesuai dengan substansi kebijakan yang diamati yang dipilih.

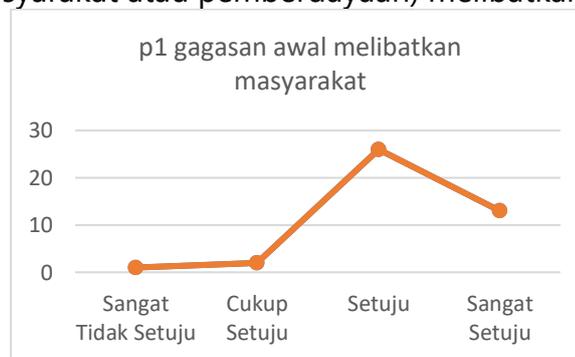
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang ada di di Kec. Mattiro Sompe. Teknik pengambilan sampel dengan cara purposive sampling yaitu memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan dan dapat dipercaya untuk dijadikan sumber data yang valid, Informan tersebut dipilih secara sengaja pada masing-masing perwakilan Desa di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang. Jumlah sampel dalam penelitian ini dipilih sebanyak 60 orang dari perwakilan masing-masing Desa yang terdiri dari Masyarakat atau tokoh masyarakat setempat yang dianggap penting dalam memberikan keterangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

a. Partisipasi tahap Perencanaan

- 1) Persentase gagasan awal pemerintah Desa Program (pelaksanaan, pembangunan Desa, Pembinaan masyarakat atau pemberdayaan) melibatkan masyarakat.



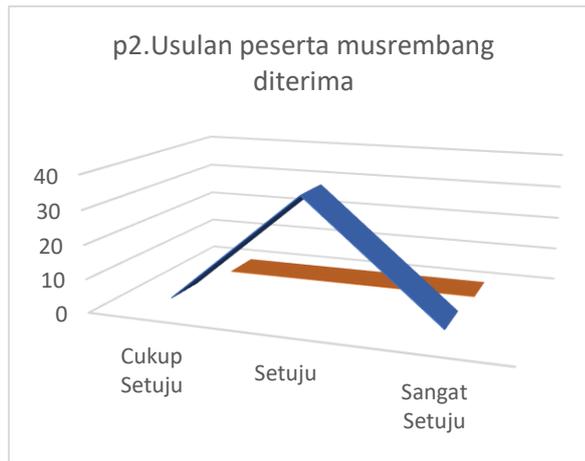
Gambar 4.1

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan kemudian diolah secara statistika kedalam distribusi frekuensi. Hasil penelitian mengenai gagasan awal pemerintah Desa melalui program (pelaksanaan, pembangunan Desa, pembinaan masyarakat atau pemberdayaan) melibatkan masyarakat memperoleh respon tertinggi yaitu 26 orang (61.9%) berpendapat setuju, 13 orang (30.9%) berpendapat sangat setuju. dengan demikian dapat disimpulkan gagasan awal pada program pemerintah desa melibatkan masyarakat.

Hasil wawancara sebagai berikut:

"iya pak betul setiap gagasan yang diberikan diterima dengan baik oleh pak Desa salah satunya gagasan yang kami usulkan itu pengadaan drainase karena di desa seringkali terjadi banjir jika hujan deras.". (AK. Kamis 10 Juni 2021).

- 2) Persentase setiap usulan peserta rapat pada musrembang diterima sebagai berikut:



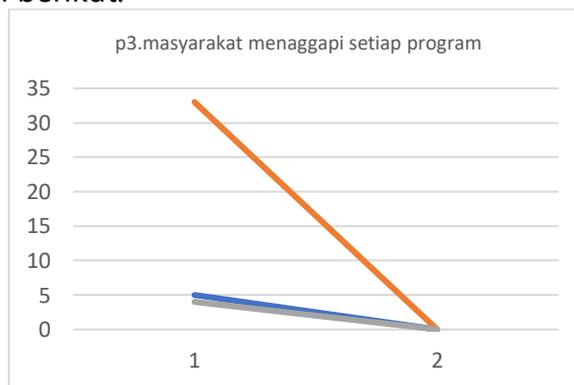
Gambar 4.2

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan kemudian diolah secara statistika kedalam distribusi frekuensi. Hasil penelitian mengenai data bahwa setiap usulan peserta rapat pada musrembang diterima memperoleh respon tertinggi yaitu 36 orang (85.7%) berpendapat setuju dan 3 orang (7.1%) berpendapat sangat setuju. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usulan rapat di musrembang diterima oleh pemerintah.

Hasil wawancara sebagai berikut:

"rapat musrembang kemarin pak semuanya diterima dengan catatan usulan tersebut membawa manfaat bagi masyarakat dan juga usulan tersebut berada dalam kondisi yang dibutuhkan" (AK) Jumat, 11 Juni 2021)

- 3) Persentase setiap program yang telah dirumuskan ditanggapi para peserta rapat musrembang sebagai berikut:

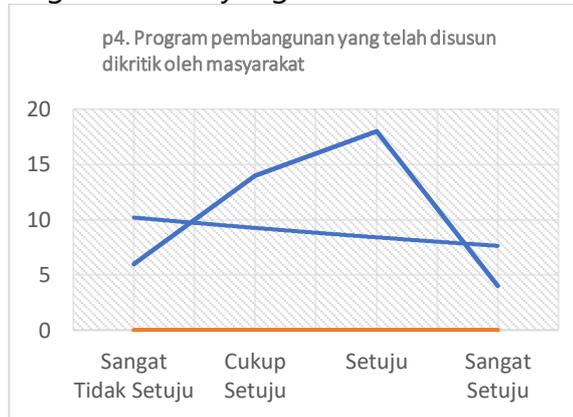


Gambar 4.3

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan kemudian diolah secara statistika kedalam distribusi frekuensi. Hasil penelitian mengenai data bahwa setiap program yang telah dirumuskan ditanggapi para peserta rapat musrembang memperoleh respon tertinggi yaitu 33 orang (78.6%) beranggapan setuju, 4 orang (9.5%) beranggapan sangat setuju. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap program yang disampaikan oleh pemerintah ditanggapi oleh masyarakat.

Hal ini sama dengan yang diungkapkan oleh AL Senin, 11 Juni 2021 bahwa :
"Memang perlu ditanggapi setiap program yang dirumuskan pada rapat musrembang demi perbaikan kualitas hidup masyarakat, karna rapat merupakan pondasi awal dalam pelaksanaan program-program pembangunan Desa kedepan.

- 4) Setiap program pembangunan Desa yang telah disusun dikritisi oleh peserta rapat



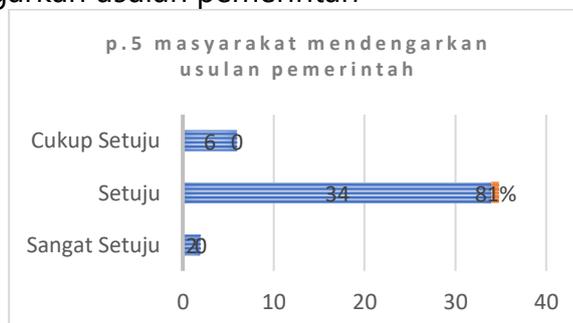
Gambar 4.4

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan kemudian diolah secara statistika kedalam distribusi frekuensi. Hasil penelitian mengenai setiap program yang telah disusun dikritisi oleh para peserta rapat memperoleh respon tertinggi yaitu 18 orang (42.9%) beranggapan setuju. 14 orang (33.3%) beranggapan cukup setuju dan 4 (9.5%) orang sangat setuju dan 6 orang (14.3%) beranggapan sangat tidak setuju. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program pembangunan desa yang telah disusun tentu mendapat kritikan oleh peserta rapat.

Hasil wawancara sebagai berikut:

"Setiap program yang telah disusun oleh pemerintah tentu perlu dikritisi, hal tersebut sudah menjadi kewajiban masyarakat agar pemabangunan kedepan lebih baik" (AK Senin 11 Maret 2021)

- 5) Pada rapat penyusunan program (pembangunan, pemberdayaan, atau pembinaan masyarakat mendengarkan usulan pemerintah



Gambar 4.5

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan kemudian diolah secara statistika kedalam distribusi frekuensi. Hasil penelitian mengenai rapat penyusunan program pembangunan, pemberdayaan, atau pembinaan memperoleh respon tertinggi yaitu

34 orang (81%) beranggapan setuju. 2 orang (4.8%) beranggapan sangat setuju dan 6 orang (14.3%) beranggapan cukup setuju. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat mendengarkan usulan pemerintah pada rapat penyusunan program.

Hasil wawancara sebagai berikut:

“Memang dalam rapat penyusunan program baik itu program pembangunan, pemberdayaan ataupun pembinaan, tentu kami selaku masyarakat mendengarkan usulan pemerintah, namun usulan tersebut tidak diterima jikalau ada usulan yang tidak bagus” (NW, Senin 11 Maret 2021).

b. Tahap Pelaksanaan

1. Persentase pembangunan sarana prasarana (lingkungan pemukiman, kesehatan atau pendidikan) melibatkan masyarakat sebagai berikut:



Gambar 4.6

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan kemudian diolah secara statistika kedalam distribusi frekuensi. Hasil penelitian mengenai pembangunan sarana prasarana lingkungan pemukiman, kesehatan atau pendidikan melibatkan masyarakat dengan presentase tertinggi yaitu 31 orang (73.8%) beranggapan sangat setuju. 9 orang (21.4%) beranggapan setuju dan 2 orang (4.8%) beranggapan cukup setuju. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembangunan sarana dan prasarana pemukiman, kesehatan dan pendidikan masyarakat dilibatkan.

Hasil wawancara sebagai berikut:

“Pelibatan masyarakat didalam pelaksanaan pembangunan sarana prasarana lingkungan, kesehatan dan pendidikan menghasilkan sebuah kreatifitas dan inovasi serta adanya keseimbangan yang relevan antara masyarakat dan pemerintah (DW, Senin 11 Maret 2021)

2. Persentase pemerintah Desa melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan Desa sebagai berikut:



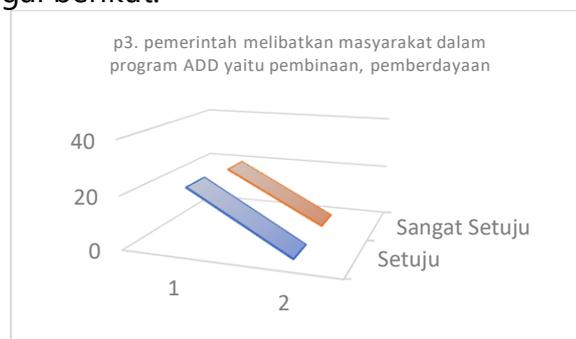
Gambar 4.7

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan kemudian diolah secara statistika kedalam distribusi frekuensi. Hasil penelitian mengenai pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan Desa dengan presentase tertinggi yaitu 26 orang (61.9%) beranggapan setuju.

Hasil wawancara sebagai berikut:

“Alhamdulillah selama ini pemerintah mengikut sertakan kami dalam pelaksanaan program pembangunan drainase, biasanya kami siapkan minuman atau dibuatkan kopi bagi pekerjanya”(BC Senin 11 Maret).

- Persentase pemerintah Desa melaksanakan program alokasi dana desa melibatkan masyarakat pada pelaksanaan program (pembangunan, pembinaan atau pemberdayaan) sebagai berikut:



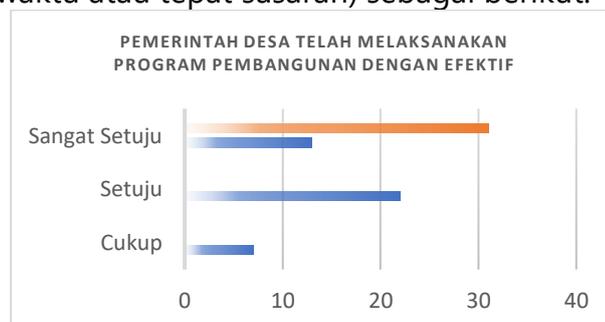
Gambar 4.8

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan kemudian diolah secara statistika kedalam distribusi frekuensi. Hasil penelitian mengenai Pemerintah Desa melaksanakan program Alokasi Dana Desa melibatkan masyarakat pada pelaksanaan program baik pembangunan, pembinaan ataupun pemberdayaan dengan presentase tertinggi yaitu 22 orang (52.4%) beranggapan sangat setuju dan 20 (52.4%) beranggapan setuju.. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program pembinaan dan pemberdayaan pemerintah telah melibatkan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh AR, Senin 11 Maret 2021 bahwa:

“Turut membantu, meskipun dalam pelaksanaannya yah sudah ada tukang, yah tentu sebagai masyarakat pasti ikut membantu, demi kemajuan Desa kita”

- Pemerintah Desa telah melaksanakan program pembangunan dengan efektif (pelaksanaan tepat waktu atau tepat sasaran) sebagai berikut:



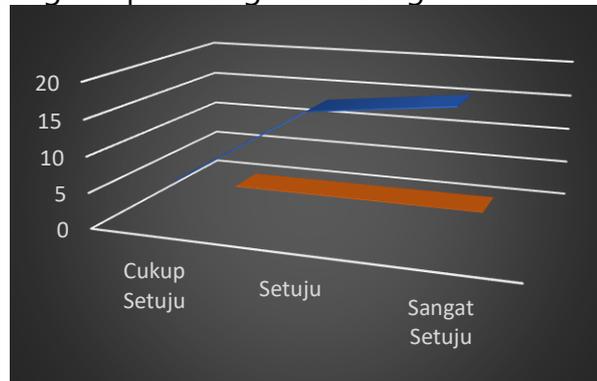
Gambar 4.9

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan kemudian diolah secara statistika kedalam distribusi frekuensi. Hasil penelitian mengenai Pemerintah Desa telah melaksanakan program pembangunan dengan efektif (pelaksanaanya tepat waktu atau tepat sasaran) dengan presentase tertinggi yaitu 22 orang (52.4%) beranggapan setuju, 13 orang (31%) beranggapan sangat setuju dan 7 orang (16.7%) beranggapan cukup setuju. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan program pembangunan dengan efektif.

Hasil wawancara sebagai berikut:

“Selama ini, program berjalan begitu saja dan kami tidak tau bahwa pelaksanaan program pembangunan tepat waktu, tapi yang jelasnya program tersebut terlaksana” (BC, Senin 11 Maret 2021)

5. Persentase masyarakat bersemangat memberikan usulan tenaga atau materi dalam pelaksanaan program pembangunan sebagai berikut:



Gambar 4.10

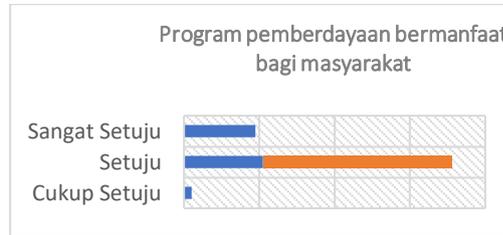
Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan kemudian diolah secara statistika kedalam distribusi frekuensi. Hasil penelitian mengenai masyarakat bersemangat memberikan usulan tenaga atau materi dalam pelaksanaan program pembangunan dengan presentase tertinggi yaitu 19 orang (45.2%) mengatakan sangat setuju. 17 orang (40.5%) beranggapan setuju dan 6 orang (14.3%) beranggapan cukup setuju. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program pembangunan oleh pemerintah masyarakat bersemangat memberikan usulan.

Berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Desa memiliki anggaran yang begitu besar, maka dari itu, pemerintah perlu diberikan usulan agar program terlaksana sesuai harapan”(BC, Senin 11 Maret 2019)

c. Tahap Pemanfaatan

1. Presentase program pemberdayaan masyarakat Desa yang dilaksanakan oleh Desa bermanfaat bagi masyarakat sebagai berikut:



Gambar 4.11

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan kemudian diolah secara statistika kedalam distribusi frekuensi. Hasil penelitian mengenai program pemberdayaan masyarakat Desa yang dilaksanakan oleh Desa bermanfaat bagi masyarakat dengan presentase tertinggi yaitu 21 orang (50%) beranggapan setuju. 19 orang (45.1%) beranggapan sangat setuju dan 2 orang (4.9%) beranggapan cukup setuju.

Hasil wawancara sebagai berikut:

“Syukur alhamdulillah, selama ada anggaran dana desa ini, kami masyarakat turut bahagia dan bisa merasakan manfaat dari sarana prasarana pembangunan saat ini”(AK, Senin 2021)

2. Persentase pemerintah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam pelaksanaan program ADD sebagai berikut:



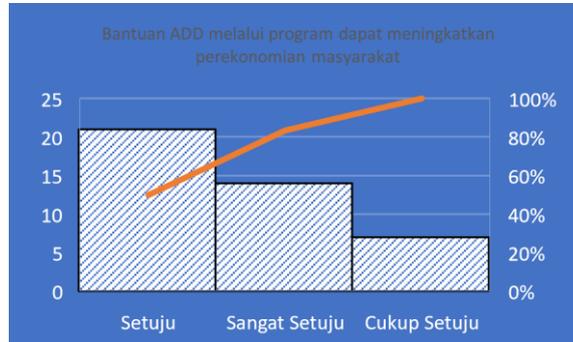
Gambar 4.12

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan kemudian diolah secara statistika kedalam distribusi frekuensi. Hasil penelitian mengenai pemerintah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam pelaksanaan program ADD dengan presentase tertinggi yaitu 19 orang (45%) beranggapan setuju. Sangat setuju 14 orang (33.3%) dan 9 orang (21%) beranggapan cukup setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Hasil wawancara sebagai berikut:

“Saya rasakan pemerintah telah memberikan pelayanan yang baik, bahkan waktu hari liburpun masih memberikan pelayanan dirumah pak kades”

3. Persentase bantuan alokasi dana desa melalui program (pembangunan, pembinaan, atau pemberdayaan masyarakat) meningkatkan perekonomian masyarakat sebagai berikut:



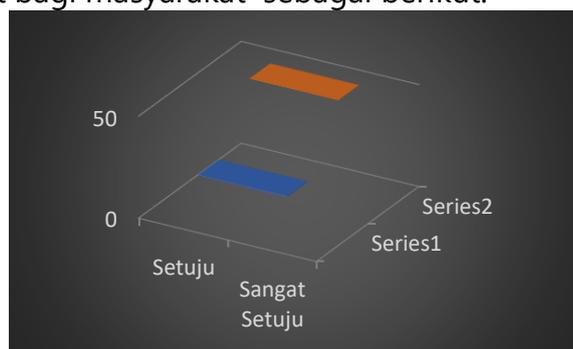
Gambar 4.13

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan kemudian diolah secara statistika kedalam distribusi frekuensi. Hasil penelitian mengenai bantuan ADD melalui pembangunan, pembinaan atau pemberdayaan meningkatkan perekonomian masyarakat dengan presentase tertinggi yaitu 21 orang (50%) beranggapan setuju, Sangat setuju 14 orang (33.3%) dan Cukup Setuju 7 orang (16.7%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bantuan ADD melalui program meningkatkan perekonomian masyarakat.

Hasil wawancara sebagai berikut:

"Pertumbuhan ekonomi sudah ada peningkatan dibandingkan dengan sebelumnya, kami sangat bersyukur skali dengan adanya bantuan ini desa sudah terbilang sejahtera oleh karena itu pemerintah harus bekerja dengan baik dan menggunakan anggaran sebaik- baiknya" (DW, Senin 11 Maret 2021)

4. Persentase program pembangunan sarana prasarana Desa melalui program ADD memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai berikut:



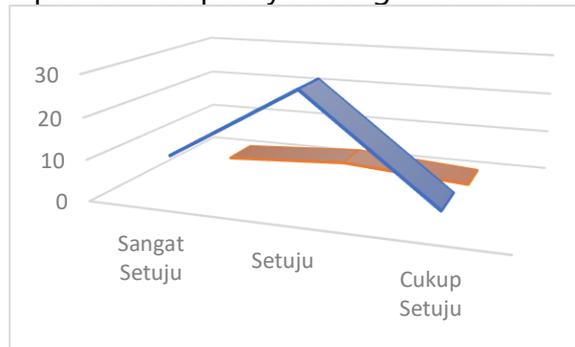
Gambar 4.14

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan kemudian diolah secara statistika kedalam distribusi frekuensi. Hasil penelitian mengenai program pembangunan sarana prasarana Desa melalui program Alokasi Dana Desa memberikan manfaat bagi masyarakat dengan presentase tertinggi yaitu 21 orang (50%) beranggapan setuju dan 21 orang (50%) Sangat Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program pembangunan sarana dan prasarana melalui program Alokasi Dana Desa.

Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh AR, Senin 11 Maret 2019 bahwa:

"Alhamdulillah, memberikan manfaat bagi pertumbuhan di Desa, sehingga bisa membangun sarana prasarana di Desa dengan baik, lapangan sepakbola, pepustakaan dsb."

- Persentase program pembangunan Desa efisien karena mempertimbangkan perbandingan teknik input dan outputnya sebagai berikut:



Gambar 4.15

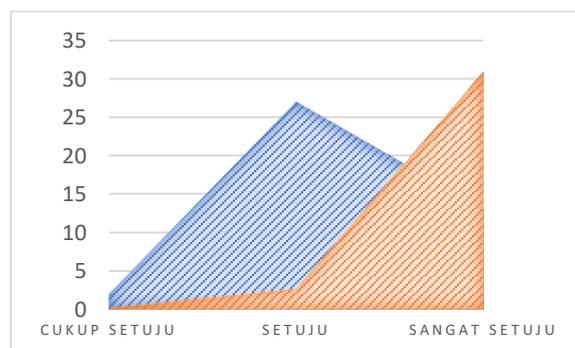
Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan kemudian diolah secara statistika kedalam distribusi frekuensi. Hasil penelitian mengenai program pembangunan Desa efisien karena mempertimbangkan perbandingan teknik input dan outputnya dengan presentase tertinggi yaitu 28 orang (66.7%) beranggapan setuju. 10 orang (23.8%) beranggapan setuju dan 4 orang (9.5%) beranggapan cukup setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program pembangunan desa berjalan dengan efisien.

Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh AR, Senin 11 Maret 2021 bahwa:

"Yah termasuk efisienlah, karena program pembangunannya sudah terlaksana sesuai waktu yang direncanakan namun masih perlu peningkatan kualitas aparat desa yang masih perlu diberikan pelatihan dalam mengelola anggaran besar ini".

d. Tahap Hasil Pembangunan

- Hasil pembangunan Desa melalui program alokasi dana desa memberikan hasil yang memuaskan bagi masyarakat Desa sebagai berikut:



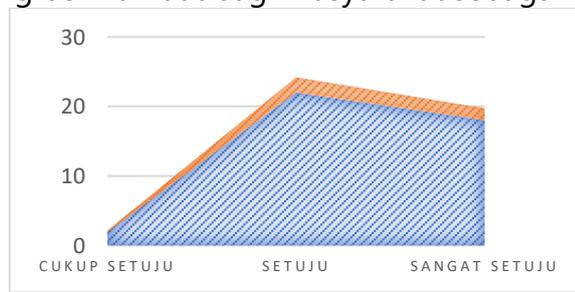
Gambar 4.16

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan kemudian diolah secara statistika kedalam distribusi frekuensi. Hasil penelitian mengenai program pemberdayaan masyarakat Desa yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa bermanfaat bagi masyarakat dengan presentase tertinggi yaitu 27 orang (64.3%) beranggapan setuju. 13 orang (31%) beranggapan sangat setuju dan 2 orang (4.8%) beranggapan cukup setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa melalui program Alokasi Dana Desa memberikan hasil memuaskan bagi masyarakat desa.

Hasil wawancara sebagai berikut:

"Program pemberdayaan masyarakat saat ini sudah ada peningkatan, yah bagaimana tidak kan ada anggaran, yah tentu harus digunakan untuk masyarakat, hanya saja yah kita taulah kemampuan pengelolannya masih belum sempurna" (NW, Selasa 12 Maret 2021)

2. Melalui bantuan alokasi dana desa program pembangunan Desa telah memberikan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat sebagai berikut :



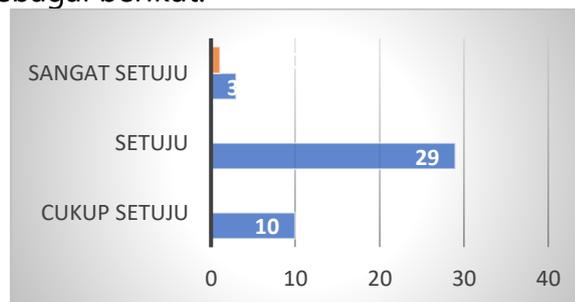
Gambar 4.17

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan kemudian diolah secara statistika kedalam distribusi frekuensi. Hasil penelitian mengenai pemerintah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam pelaksanaan program ADD dengan presentase tertinggi yaitu 22 orang (52.4%) beranggapan setuju. Sangat setuju 18 orang (42.9%) dan 2 orang (4.8%) beranggapan cukup setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa telah memberikan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat.

Hasil wawancara sebagai berikut:

"Pemerintah telah memberikan pelayanan yang baik kepada kami, bahkan hari liburpun pelayanan masih berjalan" (DW, Selasa 12 Maret 2021)

3. Persentase program pembangunan Desa berhasil meningkatkan kreativitas atau inovasi masyarakat sebagai berikut:



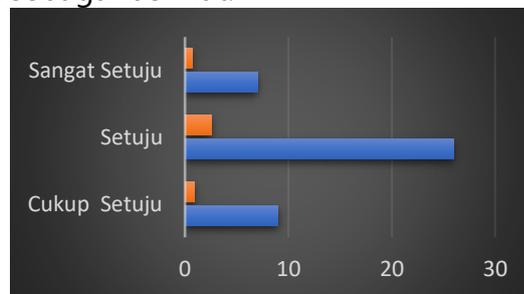
Gambar 4.18

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan kemudian diolah secara statistika kedalam distribusi frekuensi. Hasil penelitian mengenai Bantuan Alokasi Dana Desa melalui (pembangunan, pembinaan, atau pemberdayaan masyarakat) meningkatkan perekonomian dengan presentase tertinggi yaitu 29 orang (70%) beranggapan setuju. Sangat setuju 3 orang (4.3%) dan cukup setuju 10 orang (26.7%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bantuan alokasi dana desa meningkatkan perekonomian.

Hasil wawancara sebagai berikut:

"Pembangunan di desa sudah mengalami kemajuan, pemuda saat ini diberikan pembinaan berupa pelatihan menyablon dari pelatihan tersebut memberikan manfaat, jadi kalau ada kegiatan misalnya maulid, turnamen sepak bola dsb, tidak perlu jauh jauh kekota untuk menyablon baju atau bendera karena sudah ada (DW, Selasa 2021)

Persentase program pembangunan Desa melalui program alokasi dana desa sesuai harapan masyarakat sebagai berikut:



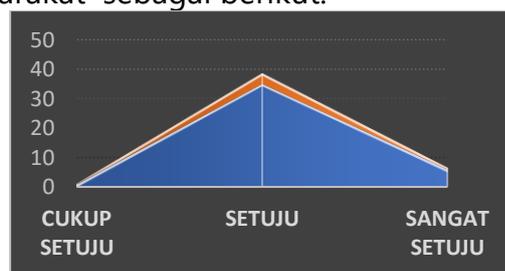
Gambar 4.19

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan kemudian diolah secara statistika kedalam distribusi frekuensi. Hasil penelitian mengenai program pembangunan Desa melalui program ADD sesuai harapan masyarakat dengan presentase tertinggi yaitu 26 orang (61.9%) beranggapan setuju. Sangat setuju 7 orang (16.7%) dan cukup setuju 9 orang (21.4%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program pembangunan Desa melalui program alokasi dana desa sesuai harapan masyarakat.

Hasil wawancara sebagai berikut:

"Program pembangunan drainase sudah membantu masyarakat mengatasi banjir saat hujan deras, pembangunan jalan, pengadaan lapangan sepak bola dan masih banyak sudah dirasakan masyarakat Desa saat ini" (NW, Selasa 12 Maret 2021).

4. Persentase hasil dari program pembangunan Desa melalui program alokasi dana desa memuaskan masyarakat sebagai berikut:



Gambar 4.20

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan kemudian diolah secara statistika kedalam distribusi frekuensi. Hasil penelitian mengenai program pembangunan Desa efisien karena mempertimbangkan perbandingan teknik input dan outputnya dengan presentase tertinggi yaitu 35 orang (83.3%) beranggapan setuju, Sangat setuju 6 orang (14.4%) dan cukup setuju 1 orang (2.4%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program pembangunan desa melalui program alokasi dana desa memuaskan masyarakat.

Hasil wawancara sebagai berikut:

"Program pembangunan Desa kurang efisien, karna anggaran yang digunakan cukup besar tapi realisasi pembangunannya tidak besar, ya alahuallah" (AK, Selasa 12 Maret 2019)

B. Pembahasan

Adanya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan hasil pembangunan. Salah satu wujud keterlibatan masyarakat adalah masyarakat mampu dan berhasil membuat perencanaan secara efektif melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Partisipasi pada tahap perencanaan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan memiliki respon yang baik setiap item pernyataan memiliki angka tertinggi pada kategori setuju, hal ini membuktikan bahwa masyarakat di Kecamatan Mattiro Bulu Kab. Pinrang ikut berpartisipasi pada tahap perencanaan. Dengan adanya keterlibatan itu, maka suatu pembangunan akan bisa dirasakan secara merata dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa sangat diharapkan guna memberikan masukan kepada pemerintah mengenai apa sebenarnya yang mereka butuhkan. Partisipasi masyarakat yang muncul adalah adanya dukungan dari mereka yang merupakan dorongan bagi pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Karena itu, tanpa adanya partisipasi maka dipastikan suatu desa tidak akan bisa melaksanakan pembangunan desa dengan baik.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Olivia Merentek (2014) bahwa dalam rangka mencapai tujuan rencana pembangunan desa yang diharapkan, diperlukan keterlibatan seluruh masyarakat sebagai pelaku pembangunan. Keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa adalah kesadaran yang tidak bisa muncul dengan sendirinya, oleh karena itu kesadaran tersebut harus dibimbing dan diarahkan dalam sebuah perencanaan. Menurut Totok Mardikanto paradigma pembangunan yang partisipatif mengidentifikasi beberapa perspektif yaitu a) pelibatan masyarakat setempat (masyarakat miskin, perempuan) dalam perencanaan, b) Pelibatan masyarakat setempat dalam pelaksanaan program atau proyek yang mewarnai hidup mereka, c) melibatkan masyarakat setempat dalam pengendalian, pelestarian agar program atau proyek dapat dikendalikan atau sustainable.

2. Tahap Pelaksanaan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan memiliki respon yang baik setiap item pernyataan memiliki angka tertinggi pada kategori setuju, hal ini membuktikan bahwa masyarakat di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang ikut berpartisipasi pada tahap pelaksanaan.

Partisipasi dalam pelaksanaan ini merupakan partisipasi yang dilakukan dalam bentuk memberikan bantuan berupa bantuan tenaga dan sumbangan dana. Sifat gotong royong serta kesadaran dari setiap masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa sangat dibutuhkan. Karena tanpa adanya bantuan gotong royong dari masyarakat desa, pelaksanaan pembangunan yang baik ialah pembangunan yang tumbuh dari kesadaran dan kepedulian yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan sifat sukarela atau dengan sepenuh hati yang nantinya akan merasakan dampak positif dari setiap hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sendiri. Undang- Undang Desa No 06 tahun 2014 tentang desa bahwa desa bahwa perencanaan pembangunan harus dilakukan disetiap desa dan menjadi kewajiban desa sebagai upaya perencanaan pembangunan yang sistematis.

Undang-undang Desa no 06 tahun 2014 ayat 2 mengenai pelaksanaan pembangunan bahwa pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ayat 3 pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Dengan kewenangan yang besar tersebut desa dalam perkembangannya harus mampu menyusun perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di desa serta pelibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dimulai dari program pemberdayaan masyarakat.

3. Tahap Pemanfaatan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa partisipasi masyarakat pada tahap pemanfaatan memiliki respon yang baik setiap item pernyataan memiliki angka tertinggi pada kategori setuju.

Hal tersebut sejalan dengan peneliti Tisha Alya Arifiani (2017) bahwa tahap pelaksanaan diwujudkan dengan memberikan bantuan tenaga berupa gotong royong membuat jalan, drainase, dan lain sebagainya sesuai dengan kegiatan pembangunan yang dilakukan di lingkungannya. Wujud lain dalam partisipasi tahap ini adalah sumbangan pemikiran atau materi. Sumbangan pikiran diwujudkan dengan memberikan masukan-masukan atau solusi atas masalah yang dihadapi ketika dilaksanakannya pembangunan.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan dan pemeratakan pembangunan desa dilakukan melalui pengalokasian dana desa yang merupakan amanat UU No.6/2014 tentang Desa serta PP No. 66 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan

masyarakat, akan tetapi oleh pemerintah dana desa tersebut lebih diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2015. Lebih besarnya dana desa yang dialokasikan pemerintah untuk penyelenggaraan pembangunan desa karena pemerintah menginginkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 78 ayat 1 UU No 16/2014 tentang desa yang menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Masyarakat sebagai subyek dari pembangunan diharapkan memiliki respon yang positif terhadap pengelolaan dana desa yang digunakan untuk pembangunan pedesaan. Adi dalam Desrita (2016) menyatakan bahwa respon pada hakekatnya merupakan tingkah laku balas atau juga sikap yang menjadi tingkah laku balik, yang juga merupakan proses pengorganisasian rangsangan dimana rangsangan-rangsangan proksimal diorganisasikan sedemikian rupa sehingga terjadi representasi fenomena dari rangsangan-rangsangan proksimal tersebut maka dari itu respon dalam penelitian ini dapat dilihat dari sikap masyarakat terhadap pengelolaan dana desa untuk pembangunan pedesaan.

4. Tahap Penilaian Hasil Pembangunan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa partisipasi masyarakat pada tahap penilaian hasil pembangunan memiliki respon yang baik setiap item pernyataan memiliki angka tertinggi pada kategori setuju hal tersebut menandakan bahwa hasil pembangunan Desa di kecamatan mattiro bulu dinikmati dan membawa manfaat luar biasa.

Alhamdulillah hal tersebut sebuah kesyukuran bagi masyarakat Desa untuk memperoleh kualitas hidup yang lebih baik, fasilitas sarana prasarana yang baik sejalan dengan peneliti Tisha Alya Arifiani (2017) bahwa tahap menikmati hasil diwujudkan dengan adanya manfaat yang diterima oleh masyarakat dari adanya pembangunan, selain itu masyarakat juga memiliki kesadaran untuk memelihara hasil dari pembangunan tersebut. Tahap evaluasi sendiri diwujudkan dengan hadirnya masyarakat

Hasil pembangunan yang saat ini dirasakan masyarakat sudah memberikan hasil yang bagus dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat meliputi pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan hal tersebut didukung penuh oleh Pemerintah dikarenakan peningkatan anggaran Dana Desa terus ditingkatkan, Pemerintah menganggarkan dana desa sebesar Rp20,7 triliun pada 2015, untuk pertama kalinya. Jumlah ini meningkat menjadi Rp46,9 triliun pada periode 2016, dan naik lagi menjadi

Rp60 triliun pada 2017. Untuk tahun 2018 pemerintah tidak mengubah besar anggaran dana desa yang akan dikucurkan, yaitu Rp60 triliun dan Rp 70 triliun tahun 2019.

Pembangunan desa dan daerah jelas menjadi prioritas utama pemerintahan. Kue pembangunan yang awalnya hanya berkulat di ibu kota, akan diratakan ke seluruh Indonesia. Hal tersebut tak lepas dari fenomena ketimpangan pendapatan antar daerah yang stagnan 0,41 dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Jika ditelusuri lebih lanjut, persoalan serius yang muncul adalah tingkat kesenjangan yang terjadi di dalam satu wilayah itu sendiri. Persoalan anggaran sering dianggap sebagai masalah utama, meskipun banyak pihak justru tidak mempermasalahkannya. Namun demikian pemerintah tetap concern dengan persoalan ini, dibuktikan dengan mulai dialokasikannya anggaran Dana Desa untuk tahun 2015.

Pengalokasian Dana Desa tersebut merupakan amanat Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN, Dana Desa memiliki potensi luar biasa dalam upaya mempercepat pertumbuhan dan pembangunan Desa dalam rangka mengatasi berbagai persoalan yang selama ini ada. Namun bagaimana menjaga supaya pemanfaatan tersebut tetap di koridor yang diharapkan, menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa di Indonesia. Harapannya, dengan anggaran yang meningkat maka desa dapat mengembangkan kualitas dan kesejahteraan masyarakatnya. Masyarakat desa yang berkualitas tentu menjadi input yang bermanfaat baik desa itu sendiri maupun bagi daerah lainnya. Desa yang maju ditunjang oleh perkembangan kota yang bijak, akan membawa Indonesia ke arah masa depan yang lebih gemilang.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah diperoleh dilapangan diketahui tahapan partisipasi melalui konsep partisipasi masyarakat dalam program alokasi dana desa di kecamatan mattiro bulu tergolong sudah bagus baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan hasil pembangunan mendapat respon yang baik dari masyarakat yang diperoleh dari hasil pengolahan data dan wawancara

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James. E. *Public Policy Making (Third Edition)*. Madison, Avenue. New York.
- Chandler, Ralph C, and Plano, Jack C. 1988. *The Public Administration Dictionary, California: ABC- Clio inc.*
- Dye Thomas R, 1981. *Understanding Public Policy Marking*, New York- Holt, RENEHART & WINSTON.
- Dunn, William N, 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Terjemahan)*, Edisi Kedua, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Googing, Malcom L, dkk. 1980. *Implementation Theory and Practice: Toward a Third Generation*. Scoot, Foresman and Company, Illionis.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. University Press Princeton New Jersey.



- Hill, Michael and Peter Hupe. 2002. *Implementing Public Policy*. SAGE Publication Ltd. London
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1984). *Implementation* (3rd ed.). Berkeley:University of California Press.
- Perry, James L. Dan Buckwater, Neal D (2010). *Public service of the future*. Journal Public Administration Review, Vol. 70, Supplement to Volume 70 (December 2010), pp. 238- 245.
- Patterson, J.A dan K.M. Burkholder. 2003. Application of prebiotics and probiotics in poultry production. Journal of Poultry Science 82 (2) : 627—631
- Patterson, J.A dan K.M. Burkholder. 2003. Application of prebiotics and probiotics in poultry production. Journal of Poultry Science 82 (2) : 627-- 631
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 *Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Robert B. Denhardt. 1984. *Theories Of Public Organization*. Wadsworth Inc, Belmont, California
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa.